



Aset DKI Rp7,9 Triliun Terancam Hilang

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, perjanjian sewa lahan yang dilakukan pemerintah sebelumnya tidak jelas. Salah satunya lahan di kawasan Kuningan yang disewa perusahaan swasta sejak puluhan tahun lalu, namun malah dijual kepada perusahaan swasta lainnya. "Padahal, tanah tersebut milik Jakarta," katanya di Balai Kota kemarin.

Begitu juga dengan pertokoan di Tanah Abang. Beruntung saat ini aset tersebut sudah berhasil dikembalikan. "Perjanjian dulu ada sebagian yang *nggak* bikin HPL (hak pengelolaan lahan) DKI, kemudian mereka

bebasin lagi. Padahal, sebenarnya *kan nggk* boleh. Makanya kita lagi teliti. Makanya kalau dibilang itu dari zaman kami, ya bukan, kami cuma cuci piring di Jakarta *nih*. Semua aset kacau balau *kok*," tuturnya.

Ahok menjelaskan, ribuan aset lahan yang mengalami masalah hukum harus diteliti dan digugat kembali apabila mengalami kekalahan. Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur ini pun ingin mengubah sistem perjanjian dan pengawasan aset milik DKI agar tidak mudah diakuisisi pihak lain.

Salah satunya mengubah sistem perjanjian kerja sama pembangunan dengan pihak

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta terancam kehilangan aset berupa lahan seluas 1.538.972 meter persegi senilai Rp7,9 triliun. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya perjanjian dan pengamanan aset.

swasta. Apabila pihak swasta tidak bisa menjalankan proyek seperti yang tertuang dalam perjanjian, secara otomatis lahan dan bangunan tersebut milik Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi, *nggak* ada lagi tuh Jakarta Monorail. Kita mau *pake* tanah kita *nggak* boleh? Ini bagaimana? Makanya saya ubah sekarang perjanjian BOT (*built, operate, transfer*) semua. Kalau kita kerja sama dengan orang dan macet, saya sita itu. Kalau kamu misal mau operasikan bus dan *nggak* jalan busnya, kami langsung ambil alih. Jadi, perjanjiannya memang sudah direncanakan," jelasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, DKI Jakarta memiliki aset tanah senilai Rp7,9 triliun, di antaranya berupa tanah lapangan bola di Kramatjati, Jakarta Timur, seluas 7.200 meter persegi senilai Rp36,6 miliar; serta tanah Dinas Kelautan dan Pertanian di Puri Kembangan Raya, Jakarta Ba-

"Makanya kalau dibilang itu dari zaman kami, ya bukan, kami cuma cuci piring di Jakarta nih."

BASUKI TJAHAJA PURNAMA
Gubernur DKI Jakarta

rat, seluas 32.470 meter persegi senilai Rp121,6 miliar; dan di Jalan Bambu Kuning, Bambu Apus, Jakarta Timur seluas 2.430 meter persegi, senilai Rp13,6 miliar, dan tanah Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur, seluas 529 meter persegi senilai Rp545,9 juta.

Adapun, tanah gudang Satpol PP di Jalan Ciputat Raya, Kampung Tanah Kusir, Kelurahan-



anKebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seluas 2.700 meter persegi senilai Rp11,2 miliar, telah digugat R Siti Sobariyah. Dokumen pemilikan berupa fotokopi penyerahan, pelepasan hak yang tersimpan di Gedung Penyimpanan Pulomas, Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku tergugat dinyatakan kalah pada tingkat pengadilan negeri.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono mengakui, cukup banyakasettanahyang dikuasai pihakketiga. Dari total nilai aset DKI, mulai dari aset bergerak dan tak bergerak sebesar Rp400 triliun, ada sebanyak 10-15 lokasi yang bermasalah seperti sengketa di pengadilan. Nilai asetnya diperkirakan mencapai Rp30 triliun.

Namun, Heru membantah manajemen aset berantakan. Menurutnya, hilang dan banyaknya aset yang bersengketa

lantaranbanyakasetberbentuk lahan kosong yang kemudian diakuisisi pihak ketiga melalui pengadilan. Kemudian, masih ada sebagian aset yang belum besertifikat. Ada juga kecenderungan lahan sekolah yang diklaim ahli waris, seperti yang terjadi di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. "Kami akan meneliti dan mendatanya kembali. Apabila milik DKI, ya kami akan ambil," ujarnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu pun meminta semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengawasi asetnya masing-masing, jangan sampai hilang diambil pihak ketiga maupun kalah dalam pengadilan. "Semua sudah kami kirimkan surat. Saya minta untuk me-review, melaporkan aset-aset yang ada di mereka dan dicocokkan dengan data di saya," ujarnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta pemprov lebih serius dalam

menangani aset-asetnya agar tidakadalagiyang dikuasai pihak ketiga dan kalah di pengadilan. Menurutnya, aset senilai Rp7,9 triliun sangat besar nilainya. "Sudah saatnya sekarang BPKAD, Biro Hukum, dan lainnya serius mengamankan fisik serta dokumen aset milik Pemprov DKI Jakarta secara tertib dan ketentuan," tandasnya.

Berdasarkan pengamatannya, hilangnya aset lahan disebabkan Pemprov DKI Jakarta lemah dalam melakukan pengamanan barang daerah dan penatausahaan dokumen kepemilikan tanah.

"Kami setuju kebijakan perombakan birokrasi yang dilakukan gubernur. Namun, kami berharap agar orang-orang yang dirombak baru tersebut tidak mengikuti budaya pejabat sebelumnya. Sehingga, tidak ada lagi pejabat yang main-main dalam pengamanan aset daerah," tegasnya.

● **bima setiyadi**